



ISSN 2685-483X

Volume 4, Issue 2, Juli-Desember 2022

Halaman 79-86



Civil Society dan Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam

Azzah Sholihah, Imam Syafi'i

d91219104@student.uinsby.ac.id, imamsyafii.iwa@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kata Kunci	Abstrak
Masyarakat Sipil Multikulturalisme Pendidikan Islam	Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan globalisasi semakin mengguncang tatanan masyarakat Indonesia. Negara yang memiliki keragaman budaya, etnik, suku, agama, dan bahasa Indonesia juga dikenal akan kemajemukannya. Keberagaman ialah suatu kebanggaan sekaligus potensi pemicu terjadinya perpecahan. Jika pada zaman pra-Islam (jahiliyah) stratifikasi sosial yang menjadi pemicu terjadinya perpecahan, kini problematika yang terjadipun semakin kompleks. Dengan studi literatur, artikel ini ditulis untuk mengembangkan wacana <i>Civil society</i> dan Multikulturalisme. Hal ini menjadi penting dibahas untuk meminimalisir terjadinya gesekan yang memicu perpecahan di Indonesia. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Serta memandang, perbedaan adalah suatu anugrah, kekayaan, dan kebanggaan tersendiri. Perbedaan bukanlah sekat yang menjadi penghalang untuk persatuan. Menghargai Hak Asasi Manusia, kesetaraan, dan menghormati keberagaman merupakan poin penting dalam wacana <i>civil society</i> dan Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan, Islam yang mengajarkan umat-Nya untuk saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan, hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara pendidikan Islam dengan terwujudnya <i>civil society</i> .
Naskah Awal	17 Juli 2022
Review Pertama	20 Agustus 2022
Revisi Akhir	21 September 2022
Diterima	21 Oktober 2022
Publish	31 Desember 2022



ISSN 2685-483X

Volume 4, Issue 2, July-December 2022

Pages 79-86



Civil Society and Muticulturalism in Islamic Education

Azzah Sholihah, Imam Syafi'i

d91219104@student.uinsby.ac.id, imamsyafii.iwa@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Keywords	Abstract
Civil Society	Along with the passage of time, the challenges of globalization are increasingly rattling the diverse cultures, ethnicities, tribes, religions, and languages of Indonesian society. Diversity is both a source of pride and a potential divider. If social stratification caused the division in the pre-Islamic era (jahiliyyah), the problems that arise today are even more complicated. This article was written using a literature review to develop a discourse on civil society and multiculturalism. It is crucial to communicate in order to reduce the friction that causes divisions in Indonesia. Uphold human rights by recognizing and valuing all differences. In addition to viewing that distinction as a gift, wealth, and pride. The difference does not hinder unity. Respect for human rights, equality, and diversity are essential components of Islamic education's discourse on civil society and multiculturalism. Islam teaches its people, in the context of education, to respect one another and appreciate all differences. This demonstrates the compatibility between Islamic education and the development of civil society.
Multiculturalism	
Islamic Education	
Submission	July 17, 2022
Initial Review	August 20, 2022
Final Revision	September 21, 2022
Accepted	October 21, 2022
Publish	December 31, 2022

Pendahuluan

Secara teoritis konsep *civil society* dan masyarakat multikultur relatif baru, tetapi dalam praktiknya, Indonesia sudah melakukannya sejak lama (Mahfud, 2006). Konsep masyarakat multikultur dan *civil society* merujuk pada Piagam Madinah yang mengindikasikan terciptanya tatanan sosial dalam masyarakat yang patuh terhadap agama, beradab, dan kondusif di tengah keberagaman. Di Indonesia, istilah *civil society* sepadan dengan istilah masyarakat madani. Masyarakat Madani digambarkan sebagaimana masyarakat Madinah yang kala itu dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw. kemudian dijadikan prototype masyarakat ideal. Perujukan terhadap masyarakat Madinah sebagai prototype masyarakat ideal bukan terletak pada struktur masyarakatnya, namun sifat-sifat yang menghiasi masyarakat ideal tersebut. Saat berinteraksi dengan sesama umat Islam maupun non-Islam, Nabi Muhammad Saw. bersikap menjaga persatuan umat Islam. Di sisi lain beliau juga bersikap penuh hormat dan beliau tidak memaksakan agama terhadap seseorang atau kelompok serta berlaku adil kepada siapapun.

Sementara itu, wacana multikulturalisme bukan hanya tentang keragaman budaya, etnik, ras, agama, dan bahasa saja. Terkadang konflik muncul karena adanya perbedaan persepsi antara kelompok satu dengan kelompok lain. Kelompok-kelompok kecil yang tidak mempunyai kekuatan karena adanya perbedaan merasa terasingkan dan termarginalisasi, sehingga timbul tekad untuk memisahkan diri dari kelompok dominan (Gollnick & Chinn, 2002). Hal itulah yang menjadi faktor yang menghambat pembangunan nasional dan peradaban yang maju.

Untuk mencapai *civil society* di tengah keberagaman negara Indonesia diperlukan adanya pendidikan, besar harapan Indonesia dengan adanya pendidikan khususnya pendidikan Islam dalam rangka membangun peradaban yang maju dari segi moral, intelektual, teknologi, dan ekonomi.

Metode

Tulisan ini menggunakan studi literatur, dalam artian seluruh kajian dilakukan menggunakan kajian dengan mengumpulkan artikel dan literatur yang terkait dengan masyarakat madani di Indonesia. Untuk mendapatkan data yang akan dipakai menjawab semua pertanyaan penelitian, maka tidak ditentukan jumlah responden ataupun informan dalam kajian ini. Alasan yang dapat diajukan adalah, semata-mata karena keterbatasan dukungan dana kajian, dan waktu pengamatan yang juga sangat terbatas. Setelah semua data terkumpul melalui artikel dan literatur yang terkait, maka terlebih dulu dilakukan pengolahan data dengan kajian literatur, agar informasi mengenai masyarakat madani yang tersebar dalam jumlah banyak tersebut menjadi lebih ringkas dan sederhana sehingga lebih mudah untuk dibaca dan dianalisis. Analisis data selanjutnya akan dilakukan dengan bantuan kata kunci berupa masyarakat madani dan multikulturalisme. Dari analisis tersebut ditarik sejumlah kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

Pembahasan

Konsep *civil society* berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat di wilayah Eropa bagian Barat. Jika ditinjau lebih jauh, konsep ini sudah berkembang sejak Cicero sampai zaman Yunani Kuno, di masa Aristoteles. Aristoteles menyebut konsep ini dengan *Koinonia Politike* yang diartikan sebagai sistem kenegaraan atau biasa identik dengan Negara itu sendiri. Berbeda dengan Aristoteles, Marcus Tullius Cicero mereka menyebutnya dengan *Societas Civili* yang identik dengan *the state* (negara), yaitu komunitas yang mendominasi sejumlah komunitas lainnya (Hikam, 1996). Konsep *civil society* juga dikembangkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke; konsep ini terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Bukan hanya konsep barat, Islam juga mempunyai konsep *civil society* dengan sebutan masyarakat madani. Pemakaian istilah “masyarakat madani” lebih populer digunakan dalam memahami istilah *civil society* di Indonesia.

Konsep masyarakat madani ini dibangun oleh Nabi Muhammad Saw. ketika beliau menjadi pemimpin di kota Madinah, dengan memproklamirkan Piagam Madinah. Dalam konteks piagam madinah menyiratkan pertama, *Ummatan Wahidah* yaitu umat yang satu meskipun mereka berbeda suku. Kedua, hubungan komunitas muslim dengan non-muslim yang didasarkan atas prinsip kesetaraan. Hal itu dapat ditunjukkan dengan berinteraksi secara baik dengan tetangga, bekerjasama melawan musuh Negara, membela yang teraniaya, dan menghormati kebebasan beragama (Tibi, 1991; Sanaky, 1999). Nabi Muhammad Saw. berhasil memberlakukan nilai-nilai keadilan, kesetaraan hukum, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Dari pemikiran tersebut, para pemikir Muslim menganggap masyarakat Madinah sebagai prototype dari masyarakat ideal dari produk Islam sebagaimana konsep *civil society*. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal merupakan kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju (Sanaky, 1999). Lebih jelasnya, masyarakat madani ialah sistem sosial yang diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. (Arifin, 2017). Selanjutnya, Gellner mengemukakan bahwa masyarakat madani akan terwujud jika tercipta tatanan masyarakat yang harmonis dan bebas dari eksploitasi. Masyarakat madani ialah kondisi suatu komunitas atau masyarakat yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. Menurut Geller dalam Jama, masyarakat sipil memprediksikan perdamaian dan kemakmuran dengan maksud meminimalisir dominasi dan manipulasi pemerintah demi menegakkan kedaulatan rakyat dan negara (Jama, 2021). Meminimalkan dominasi pemerintah dan manipulasi untuk mempertahankan kedaulatan rakyat dan negara. Kebenaran dan kekuasaan merupakan milik bersama. Setiap anggota dari masyarakat madani tidak dapat ditekan, diancam, ditakut-takuti, diganggu dan direnggut kebebasannya. Mewujudkan masyarakat madani bukanlah suatu proses yang instan, melainkan suatu proses yang panjang, merupakan sebuah perjuangan melawan dominasi penguasaan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat secara inklusif, yang selanjutnya menjadi ciri utama dari masyarakat madani (Kiranantika, 2022).

Dalam mewujudkan masyarakat madani, terlebih dahulu perlu untuk diketahui prasyarat yang tidak dapat dipisahkan antar elemen. Masyarakat madani memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. *Free Public Sphere*, yaitu setiap warga negara memiliki kebebasan untuk mengemukakan aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan publik oleh

seorang penguasa yang otoriter melalui ruang publik yang bebas.

- b. Demokrasi adalah sistem yang menjunjung tinggi wacana masyarakat madani.
- c. Toleran, yaitu melalui menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan.
- d. Pluralisme, yaitu dengan menciptakan tatanan masyarakat yang saling mengakui, menghormati. Pluralisme berarti mengakui kebutuhan akan pluralitas dan keragaman sekaligus secara aktif memberikan kontribusi relevansinya dalam rangka mendukung dan mencontoh kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pluralisme adalah usaha mewujudkan suatu realitas tentang adanya kemajemukan dan kebhinekaan dalam rangka membina dan mewadahi kehidupan bangsa dan negara.
- e. Keadilan sosial yakni dengan memberikan, membagi hak dan kewajiban yang mencakup seluruh aspek kehidupan setiap warga negara dengan seimbang dan proporsional (Rosyada, 2003; Rahman, 2021).

Berbagai karakteristik masyarakat madani yang telah disebutkan di atas memang mempersempit kemungkinan terjadinya monopoli dan pemusatan pada kelompok masyarakat tertentu. Dalam mewujudkan *civil society* tidak semudah membalikkan tangan khususnya di tengah masyarakat yang multikultural. Ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan pandangan tentang keragaman kehidupan di dunia atau kebijakan budaya adalah multikulturalisme. Multikulturalisme mulai ada di Afrika dan menyebar ke Negara yang berbahasa Inggris pada akhir tahun 1900 an. Hal ini bertolak belakang dengan monokulturalisme yang lebih dulu sudah ada di dunia pada awal abad 19. Sebenarnya apabila ditarik kepada kajian ke-Islaman, maka akan kita dapati konsep multikulturalisme ini ada pada Q.S. Al-Hujurat ayat 13 yang mengatakan bahwa: “Allah memang menjadikan manusia berbeda suku dan bangsa agar saling mengenal”. Dari ayat ini, sebenarnya Islam sudah mengenal lebih dulu tentang konsep multikulturalisme. Dalam pendidikan Islam pun perbedaan pendapat itu suatu hal yang lumrah, yang tidak diperkenankan sebenarnya adalah perdebatannya. Yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw. dalam Q.S. Ali Imron adalah bermusyawarah atau yang biasa disebut dengan diskusi, yang intinya adalah boleh berbeda pendapat tapi tetap kembali pada substansi awalnya. Jangan sampai substansinya berubah dan akhirnya menimbulkan konflik. Jadi, apabila kita berbicara tentang multikultural di Indonesia ini sudah sangat cocok, mengingat Indonesia adalah Negara dengan banyak suku, agama, ras, dan budaya. Apalagi bila dalam hal pendidikan Islam, maka kita bisa temui macam macamnya, seperti di keluarga, pondok pesantren, sekolah, maupun madrasah dengan gaya pendidikan mereka masing-masing.

Dilihat dari karakteristik masyarakat madani di atas di tengah negara multikultur, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memenuhi kriteria masyarakat madani. Hal ini ditunjukkan dengan adanya diskriminasi, rendahnya toleransi dan pluralisme; misalnya dengan pembantaian umat muslim di poso Sulawesi Barat pada tahun 2000 silam, ketidakadilan hukum bagi koruptor. Kasus diskriminasi antar suku juga mewarnai negara multikultural ini, yaitu kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya atas tuduhan beberapa aparat dan ormas mengenai perusakan dan membuang bendera merah putih ke selokan. Terjadinya konflik di

Ambon pada tahun 1999 yang menyangkut perbedaan agama antara Islam dan Nasrani. Konflik ini dipicu karena adanya kasus pemalakan oleh dua orang Muslim kepada seorang Nasrani di Ambon.

Selain itu, terdapat pihak yang tidak bebas dalam meyarakan pendapatnya, seperti kasus pemboikotan situs-situs Islam yang dianggap radikal, padahal ada diantara situs tersebut yang tidak terbukti demikian. Bukan hanya itu, moralitas masyarakat Indonesia juga memprihatinkan mulai dari pergaulan bebas, hamil diluar nikah, bayi-bayi dan anak-anak yang terlantar, tidak dianggap, dibuang, bahkan ada yang dibunuh, kasus perdagangan manusia di Maluku, penemuan ladang ganja serta senjata api di Mandailing, dan masih banyak lagi.

Dalam upaya penegakan kehidupan masyarakat madani, perlu untuk adanya penegak masyarakat yang dapat mengontrol serta mengkritisi jalannya kebijakan-kebijakan penguasa, untuk menghindari terjadinya diskriminasi. Prasyarat ini mutlak harus dilakukan demi terwujudnya kekuatan masyarakat madani. Memegang lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai kontrol sosial, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), pers dan media massa, supremasi hukum, partai politik, dan perguruan tinggi, merupakan salah satu cara penegakan masyarakat. Tidak cukup hanya itu, pemerintah harus berbenah dalam menetapkan hukum terutama menyangkut keadilan sosial, hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan juga harus diperhatikan utamanya pendidikan Islam. Pendidikan Islam sendiri dapat diartikan sebagai suatu upaya menyiapkan atau mencetak generasi bangsa yang mana selain mengenal dan memahami Islam juga dapat diaplikasikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Orientasinya bukan hanya fokus pada ajaran beribadah kepada Allah Swt. melainkan di dalamnya terdapat ajaran yang menyangkut segala aspek kehidupan manusia diantaranya ada aspek sosial, ekonomi, moral atau budi pekerti luhur, politik, yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Berkaitan dengan topik yang dibahas, dalam agama Islam mengajarkan umatnya untuk saling mengenal meski berbeda agama, budaya, latar belakang, dan lain sebagainya. Mirip dengan bagaimana Nabi Muhammad Saw. selalu memperlakukan baik Muslim maupun non-Muslim, kaya dan miskin, tanpa diskriminasi. Mereka juga harus berpegang pada ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits sebagai umat Islam.

Menurut Muhaimin, ada tiga tujuan utama pendidikan Islam. Yang pertama adalah terwujudnya manusia yang sempurna (*universal human*), yang berwajah persaudaraan dan meyakini bahwa semua manusia dilahirkan dengan hak dan kewajiban yang sama (*egalitarianisme*). Kedua, penemuan istilah "insan kaffah" yang mengacu pada orang yang mampu hidup menurut keyakinannya dalam berbagai ruang dan dimensi. Ketiga, kesadaran manusia sebagai hamba Allah SWT. dan khalifah bumi. Menjunjung cita-cita moral dan etika transendental sangat penting karena tujuan ini sangat penting untuk mengembangkan masyarakat sipil, yang merupakan komponen kunci dari masyarakat yang beradab (adat dan agama) (Ma'arif, 1999). Untuk mencapai masyarakat madani dengan mengacu pada tujuan pendidikan maka hendaknya masyarakat Indonesia sebagai anak bangsa diberikan pendidikan berkualitas tidak hanya dari segi intelektual, pendidikan karakter juga diutamakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan perbaikan moral masyarakat Indonesia. Berperadaban bukan hanya maju dalam teknologinya akan tetapi juga pemerintah dan warga negaranya bermoral (Suparlan, 2002).

Di Indonesia, implementasi paradigma pendidikan multikultural setidaknya menjadi salah satu perhatian, karena secara implisit dalam UU No. 20/ tahun

2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, dan kemajemukan pada bangsa. Pendidikan baik formal maupun informal maupun nonformal di Indonesia dapat memasukkan pendidikan multikultural. Dalam Pendidikan formal tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan tinggi, wacana Pendidikan multikultural dapat diimplementasikan melalui memasukan muatan wawasan multikultural pada kurikulum terkait seperti agama, Pendidikan kewarganegaraan, atau material lain yang relevan. Selain itu bisa juga diimplementasikan melalui pendekatan, metode dan model pembelajaran seperti diskusi dan *Contextual Teaching and Learning*. Pada pendidikan nonformal muatan pendidikan multikultural dapat diimplementasikan dengan menanamkan nilai multikultural pada pendidikan yang dilakukan oleh keluarga maupun lingkungan secara mandiri. Wawasan multikultural dapat diberikan kepada anak mulai dari praktek sederhana, seperti menyadari perbedaan jenis kelamin serta gender, pengetahuan mengenai bermacam adat istiadat, toleransi antara sesama anggota keluarga beserta teman sepermainan dan lain-lain (Tilaar, 2002; Kiranantika, 2022).

Kesimpulan

Civil society merupakan sebuah konsep yang mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki peradaban yang maju. Di Indonesia *civil society* lebih dikenal dengan istilah masyarakat madani. Untuk terwujudnya masyarakat madani perlu adanya upaya ekstra, apalagi di Negara yang multikultural seperti Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan Masyarakat madani ini adalah dengan lebih memperhatikan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Dengan pendidikan Islam diharapkan generasi penerus bangsa bukan hanya memiliki kemampuan intelek yang tinggi melainkan juga bermoral. Dengan memiliki bekal intelektualitas yang tinggi, moral, serta didukung dengan sistem pemerintah yang bijak, maka besar kemungkinan dapat terwujudnya masyarakat madani di Indonesia yang berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- Arifin, Zainal. "Konsep Pendidikan Islam Menuju Pembentukan *Civil society*". *Almufida*. Vol. II No. 1. 2017.
- Djohar, "Pendidikan yang Membebaskan sebagai Konstruksi Masyarakat Madani:" dalam *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2000.
- Gollnick, Donna M. and Philip C. Chinn, *Multikultural Education in a Pluralistic Society, Sixth Edition*. New Jersey: Merril Prentice Hall. 2002.
- Hikam, M. A. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta. PT Pustaka LP3ES Indonesia. 1996.
- Jama, Saverinus Rio. "The Essence of Civil Society in Democracy", *Journal of Etika Demokrasi* Vol. 6 No. 1. 2021.
- Kiranantika, A. (2022). Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender. *Indonesian Journal of Sociology*,

Education, and Development, 4(1), 48-55.

Ma'arif, Ahmad Syafii. "Universalisme Nilai-Nilai Politik Islam Menuju Masyarakat Madani", *Profetika*, Vol. 1. No. 2. 1999.

Mahfud, Choirul. *Pendidikan multikultur*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2006.

Rahman, Mohamad Taufiq. Paelani Setia. "Pluralism in the Light of Islam". *Jurnal Iman dan Spiritualitas* Vol. 1, No. 2. 2021.

Rosyada, Dede. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta. Kencana. 2003.

Sanaky, Hujair A.H. "Pembaharuan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani (Tinjauan Filosofis)", *Jurnal Mukaddimah*. Yogyakarta. Kopertais III. 1999.

Tibi, Bassam. *Islam and Cultural accommodation of social Change*. San Fransisco. Westview Press. 1991.

Tilaar, H.A.R. 2002. *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo